

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 20 Desember 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Tempo Nasional Halaman 1	Jumat, 20 Desember 2019	Dewan Tagih Regulasi Pemindahan Ibu Kota	Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menilai rencana presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara belum bisa dieksekusi. Alasannya, pemerintah belum merampungkan regulasi pemindahan ibu kota. "Regulasi di perlukan untuk merinci biaya pembangunan. Selagi belum ada payung hukum, pemerintah belum bisa menggelontorkan anggaran," ucap mantan anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu kota Negara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri susanto, kemarin.
2	Tempo Nasional Halaman 1	Jumat, 20 Desember 2019	Bukit Licin calon Ibu Kota	Hujan Mengguyur bumi sepanjang sore itu. Jalan tanah liat ibu kota negara kabupaten penajam paser utara, Kalimantan timur, basah. Permukaan tanah yang licin membuat mobil hiace yang di tumpangi sejumlah Menteri tergelincir. Adapun Presiden Joko Widodo melaju tanpa hambatan di atas jalan yang licin dan menanjak.
3	Tempo Ekonomi Halaman 5	Jumat, 20 Desember 2019	Pengawasan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Diperketat	Pemerintah memasitikan seluruh jalur darat siap digunakan untuk puncak lalu lintas liburan Natal dan tahun baru yang berawal pada hari ini hingga pekan depan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan jalan tol Jakarta-Cikampek menjadi jalur yang mendapat pengawasan paling ketat, termaksud jalan layang (elevated) yang baru dibuka ahad lalu.
4	Bisnis Halaman 6	Jumat, 20 Desember 2019	KEK Likupang Siap Melaju	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, segera melaju menyusul telah disahkannya peraturan pemerintah sebagai payung hukum.
5	Kompas Halaman 13	Jumat, 13 Desember 2019	Revitalisasi Jalur Pedestrian	Sejumlah foto dipajang di trotoar Kawasan Kotabaru. Yogyakarta, dalam kegiatan youngyartafest, Kamis (19/12/2019). Revitalisasi infrastruktur jalur pedestrian di Kawasan kotabaru terus dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan ketersediaan ruang publik bagi masyarakat.
6	Kompas Halaman 13	Jumat, 20 Desember 2019	Jalan Perbatasan untuk Membuka Keterisoliosasian	Pembangunan ruas jalan krayan-malinau sepanjang 200 kilometer di Kalimantan utara menjadi tumpuan untuk membuka keterisolasian wilayah yang berbatasan dengan serawak, Malaysia, ruas jalan di perbatasan itu akan menghubungkan pusat-pusat

				perekonomian di malinau. Nunukan, Tarakan dan tanjung selor.
7	Media Indonesia Halaman 14	Jumat, 20 Desember 2019	Kouta FLPP Ditambah Tahun Depan	Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menggandeng 37 bank yang terdiri atas 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah (BPD) untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di 2020.
8	Kompas Halaman 17	Jumat, 20 Desember 2019	Kebiasaan Berubah	Mobilita orang akan meningkat menjelang dan setelah natal dan tahun baru. Kendati tidak semasif periode lebaran, pergerakan orang dan kendaraan pada natal 2019 dan Tahun baru 2020 dapat menjadi pemelajaran untuk persiapan mudik lebaran 2020.
9	Bisnis Indonesia Halaman 19	Jumat, 20 Desember 2019	37 Bank Ditunjuk Jadi penyalur FLPP	Direktur Utama Pusat pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arief Sabaruddin mengatakan bahwa 37 bank pelaksana yang di tunjuk terdiri atas 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah.
10	Bisnis Halaman 19	Jumat, 20 Desember 2019	Penawaran SPAM Pekanbaru Dibuka Awal 2020	PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru mengestimasi tahap penawaran atau request for proposal pada proyek kerja sama system penyediaan air minum pekanbaru dibuka pada awal 2020.

Judul	Dewan Tagih Regulasi Pemindahan Ibu Kota	Tanggal	Jumat, 20 Desember 2019
Media	Tempo Nasional Halaman 1		
Resume	Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menilai rencana presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara belum bisa dieksekusi. Alasannya, pemerintah belum merampungkan regulasi pemindahan ibu kota. "Regulasi di perlukan untuk merinci biaya pembangunan. Selagi belum ada payung hukum, pemerintah belum bisa menggelontorkan anggaran," ucap mantan anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu kota Negara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri susanto, kemarin.		

NASIONAL

Dewan Tagih Regulasi Pemindahan Ibu Kota

Selagi belum ada payung hukum, pemerintah belum bisa menggelontorkan anggaran.

EDISI: 20 DESEMBER 2019



Presiden Joko Widodo (tengah) melintasi jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemarin. ANTARA/Puspita Periwitani

JAKARTA - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menilai rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara belum bisa dieksekusi. Alasannya, pemerintah belum merampungkan regulasi pemindahan ibu kota. "Regulasi diperlukan untuk merinci biaya pembangunan. Selagi belum ada payung hukum, pemerintah belum bisa menggelontorkan anggaran," ucap mantan anggota Panitia Khusus Pemindahan Ibu Kota Negara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, kemarin.

Menurut Yandri, Dewan telah meminta pemerintah mengkaji secara mendalam proses pemindahan ibu kota. Semua aspek, kata dia, harus dihitung, dari risiko bencana, transportasi, lingkungan, kehutanan, pertanahan, hingga keuangan. "Termasuk pula efek negatif dan positif dari pemindahan ibu kota. Jangan sampai seperti Brasil, tidak ada orang yang mau pindah ke sana."

PAN juga mempertanyakan rencana pelibatan pihak swasta dalam proses pembangunan ibu kota. Mereka khawatir kehadiran swasta akan memicu konflik kepentingan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan sektor apa saja yang akan diserahkan ke swasta. "Kalau misalnya swasta membangun gedung DPR, Istana Presiden, itu enggak boleh, sangat sensitif."

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan akan menggandeng swasta untuk membangun ibu kota negara. Sumber Tempo di lingkaran Istana menyebutkan lebih dari 80 persen pembiayaan pembangunan ibu kota akan bersumber dari swasta. Pemerintah bahkan telah menyiapkan sederet iming-iming agar swasta mau terlibat.

Anggota Komisi Dalam Negeri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menyatakan hal yang sama. Ia meminta pemerintah segera mengajukan rancangan undang-undang ibu kota negara dalam bentuk omnibus law sehingga menjadi dalam satu paket. "Kita kaji manfaat dan mudaratnya dengan jernih," ucap Mardani.

Sejauh ini, PKS belum melihat pemerintah melakukan kajian yang matang ihwal rencana pemindahan ibu kota. Pemerintah bahkan belum menggelar uji publik yang memadai. Menurut Mardani, beberapa hal yang harus diatur termasuk penetapan Badan Otorita Pengelola Ibu Kota Negara hingga konsep pembiayaannya.

PKS juga merespons temuan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) ihwal pemegang konsesi yang mendapat keuntungan dari rencana pemindahan ibu kota. Jatam melaporkan rencana itu hanya akan menguntungkan sejumlah politikus nasional dan lokal beserta keluarganya yang menguasai konsesi industri ekstraktif. Mardani berujar, semua tahapan pembangunan harus dibahas secara transparan dan akuntabel.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah telah mengusulkan sejumlah rancangan undang-undang dalam omnibus law yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Namun hingga kini Dewan belum menerima draf rancangan akademis dan draf RUU omnibus law dari pemerintah. "Katanya masih disempurnakan," ucap politikus Gerindra ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menjadi juri sayembara desain ibu kota baru, mengatakan Presiden Jokowi akan mengikuti presentasi lima besar peserta sayembara. Setelah itu, kata dia, para juri akan memilih tiga desain terbaik yang akan dipresentasikan kembali kepada Jokowi. "Langsung Pak Jokowi yang memutuskan."

Pemerintah, kata dia, telah menerima 257 usul desain ibu kota dan diseleksi 13 juri, termasuk Ridwan. Juri lainnya, di antaranya, adalah mantan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi; guru besar arsitek Universitas Indonesia, Gunawan Tjahjono; Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2011-2014, Wiendu Nuryanti; dan seniman patung Nyoman Nuarta. **BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FIKRI | AVIT HIDAYAT**

Judul	Bukit Licin calon Ibu Kota	Tanggal	Jumat, 20 Desember 2019
Media	Tempo Nasional Halaman 1		
Resume	Hujan Mengguyur bumi sepanjang sore itu. Jalan tanah liat ibu kota negara kabupaten penajam paser utara, Kalimantan timur, basah. Permukaan tanah yang licin membuat mobil hiace yang di tumpangi sejumlah Menteri tergelincir. Adapun Presiden Joko Widodo melaju tanpa hambatan di atas jalan yang licin dan menanjak.		

Bukit Licin Calon Ibu Kota

HUJAN mengguyur bumi sepanjang sore itu. Jalan tanah liat calon ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, basah. Permukaan tanah yang licin membuat mobil Hiace yang ditumpangi sejumlah menteri tergelincir. Adapun Presiden Joko Widodo melaju tanpa hambatan di atas jalan yang licin dan menanjak.

Kondisi medan yang cukup ekstrem memaksa beberapa menteri berjalan kaki menuju lokasi yang disiapkan sebagai calon ibu kota negara. Mereka adalah Menteri Badan Usaha

Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Jokowi mengatakan kontur tanah yang licin tidak akan menyulitkan rencana pembangunan ibu kota. Ia percaya para perencana kota justru akan senang jika diminta mendesain kawasan tersebut. "Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik/turun seperti ini, pasti akan senang," kata Jokowi

ketika meninjau calon lokasi ibu kota baru. Selasa lalu.

Ia membayangkan gedung-gedung kementerian dan Istana Negara akan menjulang di kawasan perbukitan. "Lokasinya sangat mendukung untuk sebuah kota yang smart city, complex city, kemudian green city semuanya," ucap Jokowi. Dia juga berandai-andai nantinya masyarakat lebih sering berjalan kaki dan naik transportasi umum. "Kalau pun ada yang menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan tersebut sudah bebas emisi. Pemerintah menyiapkan

lahan seluas 256 ribu hektare sebagai lokasi pembangunan provinsi baru. Dari total luas provinsi tersebut, sebanyak 56 ribu hektare akan diperuntukkan bagi ibu kota negara baru. Kawasan ini tidak masuk dalam pemerintahan provinsi dan akan diurus manajer kota. Sedangkan sisa lahannya dijadikan kawasan konservasi.

Jokowi juga menjelaskan, pembangunan kluster pemerintah akan dilakukan paralel dengan kluster kesehatan, pendidikan, riset dan inovasi, serta pusat keuangan. Ia juga menegaskan kawasan calon

ibu kota bukan berada di hutan alam atau hutan lindung, melainkan hutan tanaman industri yang diambil alih pemerintah dari perusahaan.

Jaringan Advokasi Tambang mengkritik rencana pembangunan ibu kota baru. Menurut organisasi itu, kawasan yang hendak dibangun berada di lahan konsesi industri ekstraktif milik para politikus lokal dan nasional beserta keluarganya. Dikhawatirkan, pembangunan ibu kota baru akan memicu konflik kepentingan.

● FRISKI RIANA | JAVIT HIDAYAT

Dewan Tagih Regulasi Pemindahan Ibu Kota

Judul	Pengawasan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Diperketat	Tanggal	Jumat, 20 Desember 2019
Media	Tempo Ekonomi Halaman 5		
Resume	Pemerintah memasitikan seluruh jalur darat siap digunakan untuk puncak lalu lintas liburan Natal dan tahun baru yang berawal pada hari ini hingga pekan depan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan jalan tol Jakarta-Cikampek menjadi jalur yang mendapat pengawasan paling ketat, termasuk jalan layang (elevated) yang baru dibuka ahad lalu.		

EKONOMI DAN BISNIS

Pengawasan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Diperketat

Sejumlah jalan tol dibuka cuma-cuma.

EDISI, 20 DESEMBER 2019



Jalan Tol Layang (Elevated) Jakarta-Cikampek (Japek) II di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahad lalu. ANTARA/Fakhril Hermansyah

JAKARTA – Pemerintah memastikan seluruh jalur darat siap digunakan untuk puncak lalu lintas liburan Natal dan tahun baru yang berawal pada hari ini hingga pekan depan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan jalan tol Jakarta-Cikampek menjadi jalur yang mendapat pengawasan paling ketat, termasuk jalan layang (elevated) yang baru dibuka Ahad lalu.

Budi mengklaim sudah mengevaluasi persiapan jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated yang sudah dilalui lebih dari 2.000 kendaraan per jam. "Ada beberapa perubahan di lokasi masuk, termasuk menghapus marka jalan lama dan penataan pembatas jalan atau barrier," kata dia, kemarin.

Budi menginstruksikan tambahan lampu penerang jalan di sepanjang jalur keluar-masuk Jakarta. Di samping pembatasan kendaraan berat pada hari tertentu, Kementerian Perhubungan melarang bus dan truk memakai jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated.

Pemerintah memperkirakan ada 16,41 juta warga yang bepergian pada libur Natal dan tahun baru kali ini. Berdasarkan survei Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, sebanyak 60 persen dari mereka memilih jalur darat. Sebanyak 48 persen dari warga yang bepergian diperkirakan memakai mobil pribadi, 4 persen memakai sepeda motor dan mobil travel, serta 8 persen memakai bus. Adapun pengguna angkutan udara diperkirakan hanya 24 persen dari total orang yang berlibur, sebanyak 15 persen memakai kereta api, dan 1 persen kapal laut.

Kementerian Perhubungan sudah memetakan potensi kemacetan. Budi mengatakan titik kepadatan tak sebanyak pada arus mudik Idul Fitri. "Potensi macet pasti ada di ruas yang sempit, kena pasar tumpah, juga di pelabuhan penyeberangan," ujarnya.

Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pandu Yuniarto mengatakan akan melakukan pemantauan harian. Petugas ditempatkan di berbagai lokasi jalur mudik, baik di Jawa maupun Sumatera, sejak 19 Desember lalu. "Ada monitoring di simpul transportasi lewat posko gabungan."

Direktur Preservasi Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Atyanto Busono mengatakan karakter perjalanan liburan akhir tahun terbagi menjadi arus mudik dan rekreasi. Karena itu, pemerintah secara khusus memperhatikan akses menuju kawasan wisata. Menurut dia, ada 170 kilometer ruas jalan tol yang dibuka secara fungsional, baik yang setengah beroperasi maupun yang beroperasi penuh, tanpa tarif alias gratis. "Pekerjaan di tol dan jalan nasional otomatis kami stop agar tak hambatan karena perbaikan jalan atau pekerjaan lain," kata dia.

Manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkirakan terdapat 4,7 juta kendaraan akan meninggalkan Jakarta dalam rentang waktu 20 Desember 2019-2 Januari 2020. "Angka ini naik 22 persen dari lalu lintas normal atau naik 5,3 persen dari lalu lintas periode Nataru 2018," ujar Direktur Operasi Jasa Marga Subakti Syukur, kemarin. **FRANSISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS**

Padat di Ujung Tahun

PEMERINTAH mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan di jalur darat. Potensi kemacetan tinggi karena 48 persen dari pemudik Natal dan tahun baru yang mencapai 16,41 juta orang memilih memakai mobil pribadi. Belum lagi ada 4 persen pengguna sepeda motor dan mobil travel. ● YOHANES PASKALIS PAE DALE | SUMBER: KEMENTERIAN PUPR, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PROYEKSI TITIK TERPADAT

Jalan nasional Medan-Berastagi (Sumatera Utara)

- Banyak jalan berliku kecil.
- Volume kendaraan tinggi.

Jalan nasional Malangbong-Limbangan-Gentong (Jawa Barat)

- Banyak persimpangan
- Pasar tumpah di jalan sempit

Pelabuhan Ketapang (Jawa Timur)

- Volume pemudik berpotensi melebihi tampungan pelabuhan.
- Volume penumpang jalur Ketapang-Gilimanuk terus tumbuh hingga 14,55 juta orang pada 2018.

Jalan tol Jakarta-Cikampek

- Kemacetan di gerbang tol Bekasi Timur hingga gerbang tol Karawang Barat (7 pintu tol).

Akses Puncak-Bandung-Lembang (Jawa Barat)

- Padat wisatawan.
- Kapasitas jalan lebih kecil dari volume kendaraan.



JALUR OPERASIONAL DAN FUNGSIONAL MUDIK AKHIR TAHUN 2019

Sumatera

- Jalan tol operasional: 496 km
- Jalan tol fungsional: 42,5 km
- Jalan non-tol: 7.918 km

Jawa

- Jalan tol Trans Jawa: 1.002 km
- Jalan tol Jakarta-Cikampek II (operasi nontarif): 38 km
- Non-tol Jawa: 4.693 km

Lain-lain:

- Jalan tol Bali-Mandara (operasional): 12,7 km
- Jalan tol Balikpapan-Samarinda (fungsional Seksi 2-4): 66 km
- Jalan tol Manado-Bitung (fungsional Seksi 1-2A): 26 km

Pengawasan Jalan Tol Jakarta-Cikampek Diperketat

Judul	KEK Likupang Siap Melaju	Tanggal	Jumat, 20 Desember 2019
Media	Bisnis Halaman 6		
Resume	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, segera melaju menyusul telah disahkannya peraturan pemerintah sebagai payung hukum.		

► POTENSI DAERAH

KEK Likupang Siap Melaju

Bisnis, MANADO — Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, segera melaju menyusul telah disahkannya peraturan pemerintah sebagai payung hukum.

M. Nurhadi Pratomo
m.nurhadi.pratomo@bisnis.com

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang. Beleid itu disahkan pada 6 Desember 2019 dan diundangkan pada 10 Desember 2019.

Regulasi itu menyebutkan KEK Likupang memiliki luas 197,4 hektare (ha). Area itu berlokasi di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut).

KEK Likupang diusulkan oleh Minahasa Permai Resort Development. Perusahaan ini memiliki 700 hektare lahan di Likupang, dengan 300 ha di antaranya merupakan kawasan hutan lindung.

Dalam PP Nomor 84 Tahun 2019, Likupang Timur disebut memiliki keunggulan geostrategis yaitu sektor pariwisata dengan tema resor dan wisata budaya. Kawasan sekitar memiliki pantai dengan *Wallace conservation center*.

Adapun, konsep KEK Likupang akan mengembangkan resor kelas premium dan kelas menengah, budaya, dan *Wallace conservation*.

Dengan adanya payung hukum tersebut, Sintesa Group melalui anak usahanya Minahasa Permai Resort Development dapat segera memulai proses pembangunan.

CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan perencanaan pembangunan KEK Likupang sudah berjalan. Menurutnya, pembangunan di sejumlah titik

akan dimulai pada 2020.

“Untuk 2020, kami akan mulai dengan kantor KEK [kawasan ekonomi khusus], infrastruktur jalan utama, desa budaya, dan pembangunan resor di plot nomor 5,” ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (18/12).

Selain itu, Sintesa Group tengah melakukan penjajakan dengan sejumlah investor untuk pembangunan marina dan beberapa plot lain sesuai dengan masterplan (rencana induk).

Sebelumnya, Shinta menjelaskan pengembangan KEK Likupang akan membawa dampak positif bagi Indonesia, khususnya Sulut. Total investasi yang masuk diperkirakan bisa mencapai Rp15 triliun.

Selain itu, pihaknya memproyeksi adanya potensi penambahan devisa dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 25%—50% per tahun. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja yang tumbuh mencapai 75% dibandingkan dengan tanpa adanya KEK Likupang.

Berdasarkan catatan Bisnis, pengembangan KEK Likupang terdiri atas aspek komersial dan non komersial. Aspek komersial dalam area itu antara lain kawasan resor, hotel, *ecovillage*, *cultural village*, marina, dan lain-lain.

Adapun aspek nonkomersial dari KEK Likupang di antaranya infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, jalan, serta pengolahan sampah atau *waste management*, baik di dalam maupun di luar kawasan.

DATANGKAN INVESTASI

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Arbonas Hutabarat memprediksi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Likupang akan mendatangkan total investasi Rp7,1 triliun ke Sulut dalam beberapa tahun ke depan. Selanjutnya,

lokasi itu diproyeksikan akan mampu memberikan kontribusi kepada pendapatan devisa Rp22,5 triliun pada 2030.

Dengan demikian, Arbonas menilai potensi dan dampak ekonomi dari KEK Likupang perlu dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dapat mendukung pengembangan baik tujuan maupun atraksi wisata.

“Ini penting agar daerah memiliki daya tawar lebih terhadap pengelola sehingga beberapa barang kebutuhan daerah tujuan wisata tidak diambil dari luar daerah. Selain itu, daerah juga perlu meningkatkan UMKM yang bergerak di bidang hiburan dan wisata budaya,” paparnya.

Dia mengajak perbankan di Sulut untuk melihat potensi dan menyalurkan kredit kepada UMKM yang bergerak di bidang pariwisata. Menurutnya, sektor itu telah menjadi sumber pertumbuhan baru kredit di Bumi Nyiur Melambai pada kuartal III/2019.

Selain itu, Arbonas mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Strategi itu dapat melalui penyediaan sekolah vokasi dan kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Daerah (Dishubda) Provinsi Sulut Jeffry Worang mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang sebagai destinasi super prioritas.

Secara detail, dia membeberkan soal rencana pembentukan segitiga kawasan wisata bahari. Lokasi itu terdiri atas Kawasan Manado—Bunaken, Kawasan Managabata (Likupang—Minut), dan Kawasan Bitung—Lembeh.

Jeffry menyebut segitiga kawasan wisata bahari akan dilayani dengan kapal rede. Fasilitas itu merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. ■

► Konsep KEK Likupang akan mengembangkan resor kelas premium dan kelas menengah, budaya, dan *wallace conservation*.

Judul	Revitalisasi Jalur Pedestrian	Tanggal	Jumat, 13 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 13		
Resume	Sejumlah foto dipajang di trotoar Kawasan Kotabaru. Yogyakarta, dalam kegiatan youngyartafest, Kamis (19/12/2019). Revitalisasi infrastruktur jalur pedestrian di Kawasan kotabaru terus dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan ketersediaan ruang publik bagi masyarakat.		

Revitalisasi Jalur Pedestrian



KOMPAS/ELIANSALIA INDEKSI #1479040

Sejumlah foto dipajang di trotoar kawasan Kotabaru, Yogyakarta, dalam kegiatan Youngyartafest, Kamis (19/12/2019). Revitalisasi infrastruktur jalur pedestrian di kawasan Kotabaru terus dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan ketersediaan ruang publik bagi masyarakat.

Judul	Jalan Perbatasan untuk Membuka Keterisolasian	Tanggal	Jumat, 20 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 13		
Resume	Pembangunan ruas jalan krayan-malinau sepanjang 200 kilometer di Kalimantan utara menjadi tumpuan untuk membuka keterisolasian wilayah yang berbatasan dengan serawak, Malaysia, ruas jalan di perbatasan itu akan menghubungkan pusat-pusat perekonomian di malinau. Nunukan, Tarakan dan tanjung selor.		

Jalan Perbatasan untuk Membuka Keterisolasian

Ruas Jalan Krayan-Malinau, yang tengah dibangun pemerintah, menjadi salah satu urat nadi perekonomian dan kesejahteraan di perbatasan Kalimantan Utara.

NUNUKAN, KOMPAS — Pembangunan ruas Jalan Krayan-Malinau sepanjang 200 kilometer di Kalimantan Utara menjadi tumpuan untuk membuka keterisolasian wilayah yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Ruas jalan di perbatasan itu akan menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Malinau, Nunukan, Tarakan, dan Tanjung Selor.

"Fokus kita (dalam lima tahun ke depan) ke pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan karena memang banyak yang belum selesai, terutama untuk jalan-jalan di wilayah-wilayah perbatasan," kata Presiden Joko Widodo, saat mengunjungi Krayan di Kabupaten Nunukan, Kamis (19/12/2019).

Dalam kunjungannya, Presiden menyusuri ruas jalan Krayan menggunakan sepeda motor, didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, dan Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid.

Menurut Presiden, pembangunan jalan vital karena menjadi dasar bagi pembangunan berbagai fasilitas publik lainnya, seperti puskesmas, rumah sakit, dan sekolah. "Kalau ini selesai, sekolah dan puskesmas bisa dibangun. Orang sakit gampang

ke pusat-pusat kesehatan yang kita bangun. Tujuannya ke sana," kata Presiden.

Basuki berkomitmen, pembangunan jalan Krayan-Malinau rampung akhir 2021. Ruas ini menjadi prioritas karena merupakan satu-satunya akses darat dari Krayan ke pusat-pusat perekonomian domestik. Sementara jalan perbatasan ditargetkan tuntas pada 2020.

Bergantung pada Serawak

Masyarakat perbatasan di Kaltara relatif masih terisolasi dan secara ekonomi bergantung pada Serawak. Bagi 18.552 jiwa penduduk di daerah Krayan, tersambunginya jalur darat Krayan-Malinau akan menjadi kunci awal yang memberi efek berantai terhadap penyelesaian berbagai persoalan hidup di perbatasan.

Sampai saat ini, satu-satunya akses keluar-masuk Krayan dengan pusat-pusat perekonomian domestik adalah jalur udara. Di samping mahal, transportasi pesawat terbang amat terbatas volumenya. Bandara Yuwai Semaring, Long Bawan, di Kecamatan Krayan baru memiliki landas pacu sepanjang 1.200 meter. Hanya pesawat berbadan kecil yang bisa mendarat dan tinggal landas di bandara itu.

Serawak di Malaysia merupakan satu-satunya pusat perekonomian yang tersambung jalur darat dengan Krayan. Waktu tempuh sekitar 6 jam perjalanan darat dengan kon-

disi jalan mayoritas berupa jalan tanah.

Dengan demikian, kebutuhan hidup masyarakat Krayan dan sekitarnya sampai saat ini masih mengandalkan pasokan dari Serawak. Komoditasnya beragam, mulai dari bahan makanan mentah, makanan olahan, sabun mandi, bensin, solar, sampai mobil.

Bahkan 100 persen kebutuhan elpiji untuk bahan bakar memasak rumah tangga pun mengandalkan pasokan dari Serawak. Harganya Rp 200.000 untuk setiap tabung 14 kilogram. Tak ada sama sekali pasokan elpiji dari domestik.

Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR Sugihartanto menambahkan, jalan Krayan-Malinau sudah 90 persen terbuka. Sisanya yang belum tersambung adalah hutan dan perbukitan. Sebagian besar masih berupa tanah.

Target selesai pada akhir 2021, menurut Sugihartanto, artinya Krayan-Malinau sudah tersambung dan bisa dilewati kendaraan roda empat. Namun, belum semuanya diaspal. Sebagian besar jalan berupa urukan batu pecah yang dipadatkan sehingga bisa dilewati kendaraan roda empat.

Laura menyatakan, sebagian wilayah di perbatasan masih terisolasi dan belum menikmati listrik. "Sebenarnya perhatian pembangunan itu sudah kami rasakan meski belum maksimal. Harapan kami, ini bisa ditingkatkan lagi," kata Laura. (LAS)

Judul	Kouta FLPP Ditambah Tahun Depan	Tanggal	Jumat, 20 Desember 2019
Media	Media Indonesia Halaman 14		
Resume	Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menggandeng 37 bank yang terdiri atas 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah (BPD) untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di 2020.		



PEMBIAYAAN FLPP: Direktur Utama Bank BTN Pahala N Mansury (kiri) berbincang dengan Sekjen Kementerian PU-Pera Anita Firmanti Eko Susetyowati (kedua dari kiri), Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid (ketiga dari kiri), dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU-Pera Eko D Heripuwanto sesuai penandatanganan kerja sama operasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun anggaran 2020 di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, kemarin.

Kuota FLPP Ditambah Tahun Depan

Pada 2020, pemerintah alokasikan anggaran FLPP sebesar Rp11 triliun untuk membangun 102.500 rumah bersubsidi. BTN tetap diberi porsi terbanyak untuk menyalurkan FLPP.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

PUSAT Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menggandeng 37 bank yang terdiri atas 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah (BPD) untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di 2020.

Bank-bank nasional yang berperan sebagai penyalur ialah Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Syariah, BRI Agro, Bank Negara Indonesia (BNI), BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Artha Graha, dan Bank KEB Hana.

Direktur Utama PPDPP Arif Sabaruddin mengatakan jumlah bank penyalur tahun depan akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun ini. Pada 2019, terdapat 39 bank yang digandeng sebagai penyalur.

"Tetapi, ada tiga bank yang tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada tambahan satu bank yang masuk, yakni BNI Syariah. Jadi total tahun depan ada 37 penyalur," ujar Arif sesuai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Operasional Penyaluran FLPP di kantornya, Jakarta, kemarin.

Tiga bank yang tidak melanjutkan merupakan BPD yang dianggap memiliki kinerja kurang maksimal dalam menyalurkan FLPP pada tahun ini. Namun, Arif mengatakan hal tersebut tidak sepenuhnya kesalahan perbankan.

"Ini juga masalah wilayah kerja. Ada daerah-daerah yang tidak potensial untuk program rumah subsidi. Otomatis itu memengaruhi kinerja BPD itu sendiri," tuturnya.

Pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP Rp11 triliun, yang berasal dari APBN sebesar Rp9 triliun dan pengembalian pokok pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya Rp2 triliun.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah menargetkan rumah yang bisa dibangun melalui program FLPP mencapai 102.500 unit.

Jumlah tersebut jauh di atas target realisasi tahun ini yang hanya sebanyak 74.000 unit dengan alokasi Rp7,5 triliun.

Tanpa menyebut angka secara spesifik, Arif mengatakan pada

tahun depan, BTN tetap memiliki porsi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP.

Masih kurang

Saat ditemui di kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury mengaku masih belum puas dengan anggaran FLPP sebesar Rp11 triliun tersebut. Dia menilai anggaran tersebut masih tidak akan mampu memenuhi besarnya permintaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun depan.

"Rasa-rasanya tahun depan akan kurang juga. Kita akan bicarakan lagi nanti dengan pemerintah," ujar Pahala, kemarin.

Sementara Bank Mandiri, pada 2020, menargetkan penyaluran KPR FLPP sebesar Rp400,6 miliar atau naik 61% dari penyaluran tahun ini sebesar Rp248,3 miliar.

"Dari limit penyaluran KPR FLPP Mandiri 2019 sebesar Rp248,3 miliar, 87% atau setara dengan Rp215,7 miliar telah disalurkan kepada 1.681 debitur pada periode Januari-November 2019, dengan kualitas yang sangat baik, atau NPL gross di 0,8%. Bisnis KPR menjadi salah satu motor utama pertumbuhan bisnis perusahaan," Direktur Consumer & Retail Transactions Bank Mandiri Hery Gunardi melalui keterangan resmi, kemarin. (Van/E-2)

Judul	Kebiasaan Berubah	Tanggal	Jumat, 20 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 17		
Resume	Mobilitas orang akan meningkat menjelang dan setelah natal dan tahun baru. Kendati tidak semasih periode lebaran, pergerakan orang dan kendaraan pada natal 2019 dan Tahun baru 2020 dapat menjadi pemelajaran untuk persiapan mudik lebaran 2020.		

JALAN TOL

Kebiasaan Berubah

Mobilitas orang akan meningkat menjelang dan setelah Natal dan Tahun Baru. Kendati tidak semasih periode Lebaran, pergerakan orang dan kendaraan pada Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dapat menjadi pemelajaran untuk persiapan mudik Lebaran 2020.

Pada momen Natal dan Tahun Baru, sebagian besar pergerakan yang terjadi adalah arus wisata atau liburan, selain pergerakan pulang ke kampung halaman. Sebagian besar pergerakan orang terpusat di Jawa. Hal itu wajar karena sekitar 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.

Meskipun momen seperti hari besar, mudik, dan liburan selalu terjadi setiap tahun, ada perubahan yang patut dicermati karena berdampak pada perubahan pola mobilitas orang dan barang, yakni infrastruktur konektivitas yang bertambah. Penambahan itu dimulai pada 2015 ketika Jalan Tol Cipali mulai dioperasikan. Kemudian, secara bertahap, jaringan Tol Trans-Jawa ke arah timur sudah dioperasikan, yang saat ini berakhir di Probolinggo, Jawa Timur.

Pengoperasian jalan tol, sebagai jalan alternatif dari jalan arteri, turut mengubah pola mobilitas orang. Misalnya, setelah Tol Trans-Jawa dioperasikan, angkutan penumpang yang menawarkan perjalanan melalui Tol Trans-Jawa sepenuhnya semakin diminati masyarakat. Beberapa operator bus yang sebelumnya hanya melayani trayek dari Jakarta menuju kota-kota di Jawa Tengah kini melebarkan sayap hingga ke Jawa Timur.

Bus antarkota antarprovinsi atau bus jarak jauh—yang kerap disebut sebagai bus malam karena menempuh perjalanan pada malam hari—kini semakin banyak menawarkan perjalanan yang dimulai pada pagi hari. Sebelum matahari terbenam, bus sudah tiba di tujuan di Jateng. Waktu tempuh lebih cepat karena bus melintas di jalan tol.

Contoh lain terjadi di koridor Jakarta-Cikampek. Selama bertahun-tahun, mobilitas orang dan barang bertumpu di Tol Jakarta-Cikampek. Kepadatan lalu lintas tak terhindarkan. Kini, pola lalu lintas di koridor tersebut akan berubah setelah Tol Layang Jakarta-Cikampek II dioperasikan. Keberadaan tol ini akan mendorong sebagian masyarakat untuk mencobanya dengan kendaraan pribadi.

Pada hari pertama pengoperasian Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II, kendaraan golongan I yang melintas sebanyak 2.600 unit per jam di satu jalur. Diperkirakan keberadaan tol ini meningkatkan lalu lintas harian secara keseluruhan sekitar 5,8 persen, dari 413.000 unit menjadi 437.000 unit. Kebanyakan adalah kendaraan pribadi.



Di Sumatera, setelah ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung resmi dioperasikan pada November 2019, pola lalu lintas kendaraan berubah. Lampung-Palembang yang sebelumnya ditempuh sekitar 12 jam, keberadaan jalan tol sepanjang 329 km itu menyingkat waktu tempuh menjadi setengahnya.

Kondisi ini akan menarik orang untuk mencoba jalan tol, termasuk untuk bepergian. Maka, dalam konteks Natal dan Tahun Baru, yang patut dicermati adalah potensi penumpukan kendaraan di pelabuhan penyeberangan.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Perhubungan memprediksi penumpang angkutan umum pada periode Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 turun 0,18 persen, dari 16,43 juta penumpang menjadi 16,41 juta penumpang. Penumpang angkutan bus, kereta, angkutan laut, dan angkutan penyeberangan naik, sedangkan angkutan udara diprediksi turun. Kendaraan pribadi masih mendominasi dengan sebagian besar memanfaatkan jalan tol.

Penggunaan tol tidak hanya mendorong mobilitas jarak jauh, tetapi juga antarkota yang berdekatan, misalnya Yogyakarta-Solo-Semarang atau Surabaya-Malang.

Panjang jalan tol yang bertambah perlu diimbangi pemahaman berlalu lintas yang lebih baik. Dengan demikian, keberadaan tol untuk mempercepat pengguna tiba di tujuan dapat tercapai. (NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR)

Judul	37 Bank Ditunjuk Jadi penyalur FLPP	Tanggal	Jumat, 20 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 19		
Resume	Direktur Utama Pusat pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arief Sabaruddin mengatakan bahwa 37 bank pelaksana yang di tunjuk terdiri atas 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah.		

► PEMBIAYAAN PERUMAHAN 2020

37 Bank Ditunjuk Jadi Penyalur FLPP

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menunjuk 37 bank pelaksana atau bertambah satu bank dibandingkan dengan tahun ini untuk menyalurkan dana bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada 2020.

Mutiara Nabila & Fitri Sartina D.
redaksi@bisnis.com

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arief Sabaruddin mengatakan bahwa 37 bank pelaksana yang ditunjuk terdiri atas 10 bank nasional dan 27 bank pembangunan daerah.

"Dari jumlah tersebut 36 bank merupakan bank lama yang telah menjadi penyalur dana FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] dan hanya 1 bank yang baru bergabung yaitu BNI Syariah," ujarnya di sela-sela acara penandatanganan perjanjian kerja sama operasional penyaluran FLPP Tahun Anggaran 2020 antara BLU PPDPP dan bank pelaksana, Kamis (19/12).

Menurutnya, penunjukan bank pelaksana sebagai bank penyalur dana FLPP berdasarkan hasil evaluasi kinerja realisasi penyaluran dana FLPP sejak kuartal I hingga kuartal IV/2019. "Penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan unsur penilaian kinerja dalam proses verifikasi, hasil pemantauan lapangan terkait ketepatan sasaran, termasuk dukungan pelaksanaan *host to host*, serta indikator kinerja keuangan," jelasnya.

Arief menyatakan bahwa bank yang gagal untuk memenuhi target penyaluran kredit pemilihan rumah (KPR) FLPP pada tahun sebelumnya tidak

► Bank yang gagal untuk memenuhi target penyaluran KPR FLPP pada tahun sebelumnya tidak lagi ditunjuk sebagai bank pelaksana penyalur dana FLPP.

lagi ditunjuk sebagai bank pelaksana penyalur dana FLPP.

Dia menyebutkan bahwa ada tiga bank pelaksana pada 2019 yang gagal memenuhi target penyaluran KPR FLPP.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa pada 2020, pemerintah juga akan lebih berfokus pada penyelenggaraan pembiayaan perumahan yang efisien dan efektif sekaligus memperhatikan kualitas bangunan rumah subsidi melalui pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal.

Berdasarkan penjelasannya, pada 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP sebesar Rp11 triliun yang terdiri atas Rp9 triliun dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 rumah. Nilai tersebut meningkat 38% dari target yang ditetapkan pada 2019.

Pada 2019, pemerintah melalui Badan Layanan Umum PPDPP mengalokasikan anggaran penyaluran dana bantuan FLPP senilai Rp7,58 triliun dari DIPA untuk 74.068 rumah. Hingga per 17 Desember 2019, realisasinya telah mencapai 104,60% dengan nilai Rp7,50 triliun yang setara dengan 77.472 rumah.

"Dengan realisasi tersebut, total penyaluran dana FLPP sejak 2010 hingga 17 Desember 2019 mencapai Rp44,33 triliun untuk 655.239 unit rumah," ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan bahwa kementerian tidak menutup jenis bank yang bekerja sama untuk menyalurkan FLPP, termasuk bank syariah.

Adapun, dengan bekerja sama dengan bank syariah, pembeli hunian

Menambah Kuota FLPP



Pemerintah berupaya mengejar target program sejuta rumah yang tahun ini dipatok sebesar 1,25 juta unit pada tahun ini. Namun, pengembangan, khususnya perumahan bersubsidi memerlukan makin menipisnya alokasi dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pemerintah pun berupaya menambah kuota itu sebesar 150.000 unit dan tinggal menunggu persetujuan Menteri Keuangan.

Penyaluran FLPP Berdasarkan Bank Pelaksana 2015–2019 (unit)

Bank Pelaksana	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
BTN	66.563	43.821	0	22.737	26.528	484.379
BTN Syariah	6.220	4.112	0	1.074	2.732	35.260
BRI Syariah	1.449	2.917	5.703	6.842	3.932	26.077
ASBANDA (32 BPD)	782	3.950	10.238	13.988	8.160	38.556
BNI	1.098	1.255	1.456	7.214	7.980	21.948
Artha Graha	191	2.359	5.579	3.885	2.257	14.271
Mandiri	26	16	166	994	1.136	4.969
Bukopin	0	0	0	0	0	1.906
BRI	160	20	603	1.161	1.353	4.030
Mandiri Syariah	0	0	0	0	0	368
Mayora	0	19	18	0	0	37
BANK KEB HANA	0	0	0	31	156	187
BRI AGRO	0	0	0	10	45	55
BTPN	0	0	0	3	0	3
TOTAL	76.489	58.469	23.763	57.939	54.279	632.046

Sumber: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR per 26 Agustus 2019

Bisnis/Petria Cahya Pratiwi

dinilai bisa lebih yakin.

"Sekarang *kan* memang ada kecenderungan orang lebih meyakini bahwa kalau dia mengikuti bank syariah *kan* merasa lebih firm secara agama dan perasaan lebih aman dan nyaman. Ini upaya kita juga yang harus lebih responsif," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Ke depannya, kata Anita, akan dilakukan penilaian-penilaian pada

bank yang telah ikut bekerja sama sehingga tidak semua bank mendaftar lalu langsung bisa ikut menyalurkan FLPP.

"Sambil berjalan, kami harus lihat dulu kinerjanya. Misalnya, kenapa BTN besar pangsa kuotanya ya, karena dari awal menjadi yang dipercaya membiayai perumahan. Mereka juga menunjukkan kinerja yang baik sehingga kita juga memiliki kesem-

patan untuk meningkatkan [kuota] ke mereka," imbuhnya.

LEBIH TINGGI

Pada kesempatan berbeda, Kementerian PUPR optimistis capaian pembangunan perumahan pada 2020 bisa lebih tinggi, terutama setelah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).

Anita mengatakan bahwa aplikasi tersebut bisa untuk melihat apakah masyarakat yang mengajukan pembelian rumah sudah mempunyai rumah lebih dari satu untuk investasi atau belum sehingga subsidi yang dialirkan lebih merata dan adil.

"Dengan adanya sistem seperti ini *kan* akan jadi lebih transparan. Perilaku curang-curang supaya dapat subsidi tersebut akan terblokir karena terhubung juga ke Dinas Dukcapil [kependudukan dan catatan sipil]," ungkap Anita seisi peluncuran SiKasep, Kamis (19/12).

Menurut Anita, keberadaan aplikasi tersebut akan memberi pengaruh yang cukup besar untuk memangkas angka kekurangan pasok rumah (*backlog*) lantaran data yang ada lebih akurat.

Adapun, jika melihat upaya yang telah dilakukan pemerintah baik dari aplikasi SiKasep, subsidi, insentif, dan lainnya, Kementerian PUPR optimistis pembangunan rumah tahun depan bisa lebih banyak dan lebih merata.

"Tahun depan target program sejuta rumah masih sama [1,25 juta], tapi capaiannya kami yakin bisa lebih tinggi. Kita terus berusaha karena upaya yang dilakukan pemerintah itu *kan* tidak hanya melalui subsidi atau melalui keuangan," katanya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga mendapat beragam usulan dari pengembang, pelaku industri, konsumen, dan perbankan terkait dengan peningkatan anggaran rumah bersubsidi.

Anita menegaskan bahwa kementerian akan mengupayakan untuk mengakomodasi usulan-usulan tersebut agar bisa terwujud. ■

Judul	Penawaran SPAM Pekanbaru Dibuka Awal 2020	Tanggal	Jumat, 20 Desember 2019
Media	Bisnis Halaman 19		
Resume	PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru mengestimasi tahap penawaran atau request for proposal pada proyek kerja sama system penyediaan air minum pekanbaru dibuka pada awal 2020.		

► KERJA SAMA AIR MINUM

Penawaran SPAM Pekanbaru Dibuka Awal 2020

Bisnis, JAKARTA — PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru mengestimasi tahap penawaran atau *request for proposal* pada proyek kerja sama Sistem Penyediaan Air Minum Pekanbaru dibuka pada awal 2020.

Ketua Pengadaaan Proyek SPAM Pekanbaru M. Suhandi mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu persetujuan dana dukungan tunai atau *viability gap fund* (VGF) dari Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, sejak pekan lalu, PDAM Tirta Siak sudah mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait dengan rencana usaha perseroan.

Rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR dibutuhkan sebagai syarat pengajuan VGF kepada Kementerian Keuangan.

Dana VGF yang diajukan mencapai Rp168 miliar atau 22,40% dari nilai proyek Rp750 miliar. "Rekomendasi teknisnya baru keluar 1 minggu lalu. Jadi, kami sedang ajukan besaran VGF. Mungkin baru Januari 2020 [sudah ada persetujuan] karena saat ini kan sudah mau libur [akhir tahun]," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (19/12).

SPAM Pekanbaru merupakan proyek kerja sama pertama di sektor air minum yang diharuskan mendapatkan rekomendasi teknis dalam pengajuan VGF. Pemberian rekomendasi, lanjut Suhandi, juga selaras dengan evaluasi rencana bisnis yang dilakukan oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan SPAM.

Suhandi mengatakan bahwa pihaknya siap membuka tahap penawaran bila sudah mengantongi persetujuan besaran VGF.

Dia optimistis seluruh tahapan tersisa dalam proyek ini akan tuntas pada tahun depan. Tahapan tersebut yaitu penawaran, penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, pemenuhan pembiayaan, dan konstruksi.

Sejauh ini, ada enam peserta yang dinyatakan lulus prakualifikasi. Mereka adalah KSO PT Adhya Tirta Batam dan PT Bangun Cipta Kontraktor; konsorsium Manila Water Inc., PT Indah Karya, dan PT Sarana Tirta Ungaran; konsorsium Maynilad Water Services Inc., PT Moya Indonesia, dan PT Elnusa Tbk.; konsorsium Metito Indonesia dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.; konsorsium Memiontec Indonesia, PT PP Infrastruktur, dan PT Envitech Perkasa; serta konsorsium PT Krakatau Tirta Industri, PT Brantas Abipraya, dan PT Rukun Raharja. *(Rivki Maulana)*